

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di sebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana dan program, RENJA menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis (RENSTRA) kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur.

Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2019 ini merupakan tahun kedua dari pencapaian tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan Tahun 2017-2022 yaitu :

"Singkawang HEBAT 2022"

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang Hebat 2022 mengandung makna Strategis, sebagai berikut:

- a. **H**armonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif, dan Mandiri;
- c. **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
- d. **A**dil dan merata dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
- e. **T**erdepan dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya.
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri.
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang berorientasi pada pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas.
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan.
7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Dari penjabaran visi dan Misi diatas, Misi ke 4 (Empat) yaitu: “**Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang berorientasi pada pelayanan Publik yang Prima berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi**”, merupakan visi yang menjadi amanat bagi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana meningkatkan pengelolaan Keuangan Daerah ini sejalan dengan pokok visi Pembangunan Kota Singkawang untuk menciptakan **Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif** dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Adapun sasaran serta strategis dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Singkawang

| Sasaran | Strategis | Arah Kebijakan |
|--|---|---|
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Pembinaan terhadap Aparat Pengelolaan Keuangan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Workshop Pemantapan Penatausahaan dan |

| | | |
|--|---|--|
| | | akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual. |
| | Meningkatkan Sarana Prasarana pengelolaan keuangan daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi pengelolaan keuangan. |
| | Mengembangkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah • Pengelolaan Barang dan Aset Milik Daerah • Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah • Pekan Panutan Pajak Daerah • Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah • Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 - b. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 - d. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438);
 - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);
 - g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 TAHUN 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008– 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- r. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
- s. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Singkawang;
- t. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
- u. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);

- v. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
- w. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018–2022;
- x. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 adalah:

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam satu tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD dan Renstra PD;
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagai institusi;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renja PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 adalah:

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud dapat mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama satu tahun kedepan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

3.4. Telaahan Renstra Ditjen Bina Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Renstra BPKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2024

3.5. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penentuan Isu-lsu Strategis

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Adapun yang Evaluasi dalam pelaksanaan Renja BKD Tahun 2018 dan Capaian Renstra BKD 2018-2022, antara lain :

2.1.1 Berikut adalah Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi Target kinerja hasil/ Keluaran yang direncanakan Badan Keuangan Daerah :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan Tanah
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal
- Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)
- Penyusunan Renstra SKPD

Program Penguatan Transparansi Publik

- Expo Kinerja SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan
- Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD
- Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer
- Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Serah Terima Aset
- Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
- FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah

- Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang
- Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
- Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana
- Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga
- Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD
- Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
- Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD
- Distribusi Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah
- Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD TA. 2019
- Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan
- Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah
- Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD

Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
- Penertiban Izin Pemasangan Reklame
- Rapat Koordinasi Pendaptan Asli Daerah
- Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan
- Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah
- Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan
- Penertiban Penerimaan Pajak Daerah
- Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2
- Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2
- Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
- Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB
- Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak

- Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
- Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2

Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan

- Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2

2.1.2 Berikut adalah Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Keuangan Daerah :

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan LAKIP SKPD
- Penyusunan LPPD / LKPJ
- Penyusunan Profil SKPD
- Penyusunan Renja SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

2.1.3 Berikut ini Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :

Tidak ada

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja antara lain :

a. Faktor penyebab program yang belum mencapai target :

- Karna Evaluasi Pelaksanaan Renja dilakukan pada Triwulan I, dimana masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan, kemudian ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan II dan III, dan adanya perubahan regulasi yang berdampak pada pelaksanaan program/kegiatan pada Badan

Keuangan Daerah Kota Singkawang.

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
- Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatarbelakang akuntansi.
- Kurangnya sistem pengembangan SDM yang ada.
- Masih kurangnya perda sebagai payung hukum dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- Kuantitas bimtek pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) kepada staf sangat rendah, baik formal maupun informal.
- Perangkat hukum untuk mendukung penerapan sanksi kepada wajib pajak belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan yang ada.
- Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak/wajib retribusi dan perlunya dilakukan kajian dan evaluasi terhadap tarif pemungutan pendapatan asli daerah (PAD).
- Kurang tegasnya kebijakan dari pemerintah kota untuk menegakkan perda retribusi jasa umum.

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT

1. Faktor Internal:

Kekuatan/Potensi (*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;

3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi Komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Faktor Eksternal :

Kesempatan/Peluang(Oportunity)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stake holder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Jika target capaian program/kegiatan Renja Tahun 2018 banyak yang tidak tercapai, otomatis berimplikasi pada capaian Renstra yang telah ditetapkan, karena Renstra memuat target Capaian Program Kegiatan selama lima Tahun kedepan yang disusun kedalam Renja Tahunan .

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah
3. Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (msh kosong karena renstra di mulai dari 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n- 2 2017 | | | Target Progra m dan Kegiat an (Renja Perang kat Daerah Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 | |
|----------------------|---|--|--|---|---|---|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2017 | Realisasi Renja Perangka t Daerah Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018 (tw l) | Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 4.02.02. | Badan Keuangan Daerah | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.001 | Program Pelayanan Administrasi | Presentase unit kerja internal yang terlayani | 100% | - | - | - | - | | 27,69% | 15,58% |

| | Perkantoran | dengan baik | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------|---|---|---|---|----------|-----|--------|
| 4.02.4.02.02.0 01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 30% | 18,00% |
| 4.02.4.02.02.0 01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 12 bulan | 30% | 18,00% |
| 4.02.4.02.02.0 01.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 70% | 15,00% |
| 4.02.4.02.02.0 01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 20% | 18,00% |
| 4.02.4.02.02.0 01.008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 20% | 16,00% |
| 4.02.4.02.02.0 01.010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | cakupan jasa Alat Tulis Kantor yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 20% | 15,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------|---|---|---|---|----------|-----|--------|
| 4.02.4.02.02.0 01.011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 20% | 13,00% |
| 4.02.4.02.02.0 01.012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 20% | 11,00% |
| 4.02.4.02.02.0 01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 12 bulan | 30% | 20,00% |
| 4.02.4.02.02.0 01.017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 10% | 14,60% |
| 4.02.4.02.02.0 01.018 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 30% | 19,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------|---|---|---|---|----------|---------------|--------------|
| 4.02.4.02.02.0 01.020 | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran | cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan | 100% | - | - | - | - | 12 bulan | 30% | 19,00% |
| 4.02.4.02.02.0 01.025 | Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah | cakupan Tamu daerah yang disediakan fasilitasnya | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 30% | 6,00% |
| 4.02.4.02.02.0 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 100% | - | - | - | - | | 12,86% | 7,89% |
| 4.02.4.02.02.0 02.005 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | cakupan kendaraan dinas/operasional yang diadakan | 100% | - | - | - | - | 6 unit | 0% | 0,00% |
| 4.02.4.02.02.0 01.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 100% | - | - | - | - | 8 paket | 15% | 12,00% |
| 4.02.4.02.02.0 02.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan | 100% | - | - | - | - | 9 paket | 20% | 12,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------|---|---|---|---|----------|---------------|----------------|
| 4.02.4.02.02.0 02.011 | Pengadaan Tanah | Cakupan Pengadaan Tanah yang diadakan | 100% | - | - | - | - | 8.288 m2 | 0% | 4,00% |
| 4.02.4.02.02.0 02.022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 20% | 10,00% |
| 4.02.4.02.02.0 02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 15% | 10,20% |
| 4.02.4.02.02.0 02.028 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 100% | - | - | - | - | 100,00 | 15% | 7,00% |
| 4.02.4.02.02.0 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase peningkatan disiplin Aparatur | 100% | - | - | - | - | | 20,00% | 16,00 % |
| 4.02.4.02.02.0 03.002 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | 195 stel | - | - | - | - | 65 stel | 20% | 16,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------|---|---|---|---|-----------|---------------|---------------|
| 4.02.4.02.02.0 03.005 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan | 195 stel | - | - | - | - | 65 stel | 20% | 16,00% |
| 4.02.4.02.02.0 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Penyusunan PAK tenaga Fungsional meningkat | 100% | - | - | - | - | | 0,00% | 2,50% |
| | Pendidikan dan pelatihan formal | Cakupan Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100% | - | - | - | - | 10 orang | 0% | 0,00% |
| 4.02.4.02.02.0 05.010 | Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur | Cakupan peserta yang mengikuti bimtek pengelola BMD | 100% | - | - | - | - | 10 orang | 0% | 5,00% |
| 4.02.4.02.02.0 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | - | - | - | - | | 75,71% | 18,14% |
| 4.02.4.02.02.0 06.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5 dokumen | | | | - | 1 dokumen | 10% | 10,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------|---|---|---|---|------------------|------|--------|
| 4.02.4.02.02.0 06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Dokumen LAKIP SKPD | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokum en | 100% | 20,00% |
| 4.02.4.02.02.0 06.005 | Penyusunan LAKIP SKPD | Jumlah Renstra SKPD | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokum en | 100% | 20,00% |
| 4.02.4.02.02.0 06.006 | Penyusunan Renstra SKPD | Dokumen LPPD / LKPJ | 2 dokumen | - | - | - | - | 1 dokum en | 20% | 17,00% |
| 4.02.4.02.02.0 06.007 | Penyusunan LPPD / LKPJ | Dokumen Profil SKPD | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokum en | 100% | 20,00% |
| 4.02.4.02.02.0 06.008 | Penyusunan Profil SKPD | Dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokum en | 100% | 20,00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|---|---|---|---|------------|---------------|----------------|
| 4.02.4.02.02.006.010 | Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) | Dokumen LAKIP SKPD | 10 dokumen | - | - | - | - | 2 dokumen | 100% | 20,00% |
| | Penyusunan Renja SKPD | Jumlah Renja SKPD | 5 dokumen | | | | | | | |
| 4.02.4.02.02.007 | Program Penguatan Transparansi Publik | Persentase peningkatan pelayanan masyarakat | 100% | - | - | - | - | | 0,00% | 0,00% |
| 4.02.4.02.02.007.001 | Expo Kinerja SKPD | Jumlah Kegiatan Expo Kinerja SKPD | 5 kegiatan | - | - | - | - | 1 kegiatan | | 0,00% |
| 4.02.4.02.02.017 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun | 8 Dokumen | - | - | - | - | | 14,58% | 10,19 % |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------|---|---|---|---|------------------|-----|--------|
| | | Persentase Silpa terhadap APBD | 0% | | | | | | | |
| | | Persentase Aset-aset Daerah yang terdata | 100% | | | | | | | |
| 4.02.4.02.02.0 17.006 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Jumlah peraturan daerah tentang APBD Kota Singkawang | 5 perda | - | - | - | - | 1 perda | 50% | 20,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.007 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD | 5 perwako | - | - | - | - | 1 perwak o | 50% | 20,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.008 | Penyusunan rancangan peraturan tentang Perubahan APBD | Jumlah Perda tentang Perubahan APBD | 5 perda | - | - | - | - | 1 perda | 0% | 10,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.009 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran | Jumlah Perda tentang Perubahan Penjabaran | 5 perwako | - | - | - | - | 1 perwak o | 0% | 5,00% |

| | Perubahan APBD | APBD | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------|---|---|---|---|---------------|-----|--------|
| 4.02.4.02.02.0 17.010 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jumlah Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD | 5 perda | - | - | - | - | 1 perda | 10% | 20,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.011 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jumlah Perwako tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD | 5 perwako | - | - | - | - | 1 perwak o | 10% | 20,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.020 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Cakupan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan | 60 bulan | - | - | - | - | 12 bulan | 0% | 8,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.021 | Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | 25 dokumen | - | - | - | - | 5 dokum en | 0% | 2,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------|---|---|---|---|------------|-----|--------|
| 4.02.4.02.02.0 17.022 | Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan | Cakupan Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 0% | 2,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.023 | Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD | Cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan | 26.605 SP2D | - | - | - | - | 5.321 SP2D | 10% | 8,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.024 | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer | Jumlah Dokumen/laporan Realisasi Dana Transfer | 20 laporan | - | - | - | - | 4 laporan | 15% | 11,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.025 | Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang | Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS | 70 Bulan | - | - | - | - | 14 bulan | 25% | 15,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.026 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumentasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa RKBMD, RKPBM, Laporan Semester dan | 10 dokumen | - | - | - | - | 2 dokumen | 10% | 7,00% |

| | | Tahunan Barang | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------|---|---|---|---|-------------|-----|--------|
| 4.02.4.02.02.0 17.027 | Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Perangkat Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah | 5 perangkat | - | - | - | - | 1 perangkat | 0% | 4,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.028 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 10% | 6,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.029 | Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | 500 orang | - | - | - | - | 100 orang | 0% | 10,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.030 | Serah Terima Aset | Jumlah dokumen Penyelesaian Serah Terima Aset | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 0% | 2,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.032 | Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) | Jumlah Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan | 5 aplikasi | - | - | - | - | 1 aplikasi | 25% | 15,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------|---|---|---|---|------------|------|--------|
| | | Daerah (SIPKD) | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.02.0 17.033 | FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan sistem informasi Keuangan Daerah | Jumlah OPD peserta workshop | 130 OPD | - | - | - | - | 26 opd | 45% | 19,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.034 | Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset dari Sumber Lainnya | Jumlah paket Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya | 5 paket | - | - | - | - | 1 paket | 0% | 0,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.037 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan | 90 laporan | - | - | - | - | 18 laporan | 25% | 11,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.039 | Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD | Persentase penyelesaian Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD | 100% | - | - | - | - | 100 % | 100% | 20,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.040 | Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana | Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Penyediaan | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 25% | 15,00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|------------|---|---|---|---|------------------|-----|--------|
| | | Dana | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.02.017.041 | Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga | Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga | 60 laporan | - | - | - | - | 12 laporan | 25% | 15,00% |
| 4.02.4.02.02.017.042 | Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD | Tersedianya Bahan Penyusunan Raperda | 30 dokumen | - | - | - | - | 6 dokumen | 20% | 12,00% |
| 4.02.4.02.02.017.043 | Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) | Jumlah Laporan Realisasi SPM SKPD dan PPKD | 60 laporan | - | - | - | - | 12 bulan/laporan | 25% | 15,00% |
| | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD | Jumlah laporan realisasi Anggaran PPKD | 30 dokumen | - | - | - | - | 6 dokumen | 25% | 15,00% |
| 4.02.4.02.02.017.047 | Distribusi Barang Milik Daerah | Jumlah Distribusi Barang Milik Daerah ke OPD | 105 OPD | - | - | - | - | 21 opd | 0% | 2,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------|---|---|---|---|---------------|-----|--------|
| 4.02.4.02.02.0 17.050 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Kodefikasi BMD | 105 OPD | - | - | - | - | 1 dokum en | 0% | 2,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.051 | Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokum en | 0% | 2,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.052 | Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah | Jumlah Peserta Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran | 800 orang | | | | - | 160 orang | 0% | 2,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.054 | Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD TA. 2019 | Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri | 130 OPD | - | - | - | - | 26 OPD | 0% | 20,00% |
| 4.02.4.02.02.0 17.060 | Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah peserta sosialisasi Permendagri | 600 orang | - | - | - | - | 120 orang | 0% | 20,00% |
| | Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan | Jumlah dokumen aset tanah dan bangunan | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokum en | 10% | 6,00% |
| | Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah | Jumlah dokumen laporan neraca aset daerah | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 dokum en | 10% | 6,00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|------------|---|---|---|---|-----------|---------------|---------------|
| | Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD | Jumlah OPD peserta sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah | 26 OPD | - | - | - | - | 26 OPD | 0% | 0,00% |
| 4.02.4.02.02.040 | Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Persentase kenaikan pendapatan asli daerah | | - | - | - | - | 1 dokumen | 15,13% | 14,03% |
| 4.02.4.02.02.040.001 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB | Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB | 5 dokumen | - | - | - | - | 26 OPD | 15% | 15,00% |
| 4.02.4.02.02.040.002 | Penertiban Izin Pemasangan Reklame | Jumlah Penertiban Izin Pemasangan Reklame | 5 dokumen | - | - | - | - | | 10% | 14,00% |
| 4.02.4.02.02.040.003 | Rapat Koordinasi Pendaptan Asli Daerah | Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordinasi Pendaptan Asli Daerah | 10 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 0% | 14,00% |
| 4.02.4.02.02.040.004 | Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan | Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 20% | 20,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-----------------|---|---|---|---|------------------|-----|--------|
| 4.02.4.02.02.0 40.005 | Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | 5 dokumen | - | - | - | - | 2 dokum en | 20% | 16,00% |
| 4.02.4.02.02.0 40.006 | Intensifikasi Sumber- sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah | Jumlah Dokumen Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah | 20 dokumen | - | - | - | - | 1 dokum en | 12% | 14,40% |
| 4.02.4.02.02.0 40.007 ok | Penertiban Penerimaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penertiban Penerimaan Pajak Daerah | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 dokum en | 12% | 14,40% |
| 4.02.4.02.02.0 40.008 | Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2 | Jumlah Perwako PBB-P2 | 5 perwako | - | - | - | - | 4 dokum en | 6% | 5,20% |
| 4.02.4.02.02.0 40.011 | Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2 | Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2 | 375.000 SPPT | - | - | - | - | 1 dokum en | 50% | 20,00% |
| 4.02.4.02.02.0 40.012 | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | Jumlah dokumen pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | 5 dokumen | - | - | - | - | 1 perwak o | 20% | 15,00% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------------|---|---|---|---|--------------------|-----|--------|
| 4.02.4.02.02.0 40.014 | Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah | 5 basis data | - | - | - | - | 75.000 SPPT | 12% | 16,40% |
| 4.02.4.02.02.0 40.015 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB | Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB | 10 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | 20% | 16,00% |
| 4.02.4.02.02.0 40.018 | Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak | Jumlah produk hukum pajak daerah | 5 perda, 10 perwako | - | - | - | - | 1 basis data | 10% | 16,00% |
| 4.02.4.02.02.0 40.019 | Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi | 10 dokumen | - | - | - | - | 2 dokumen | 0% | 2,00% |
| 4.02.4.02.02.0 40.020 | Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB | Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah | 10 dokumen | - | - | - | - | 1 perda, 2 perwako | 20% | 12,00% |
| | Pemutakhiran Data Piutang PBB- P2 | Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Piutanh | 4 Dokumen | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---|---|---|---|------------|---------------|--------------|
| | | PBB-P2 | | | | | | | | |
| | Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah | Persentase Peningkatan sistem Pengendalian dan Evauasi Pendapatan Daerah | | - | - | - | - | 2 dokum en | 20,00% | 8,00% |
| | Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB-P2 yang dimutakhirkan | 150.000 OP | - | - | - | - | 2 dokum en | 20% | 8,00% |

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2018 - 2022, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan. Indikator kinerja sasaran strategis belum dapat ditampilkan mengingat Renja ini dibuat pada triwulan 1 tahun 2018, sedangkan data realisasi indikator kinerja tersebut akan bisa diketahui pada akhir tahun 2018 dan/atau awal tahun 2019. Adapaun Data yang disajikan dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Layanan PD Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat (IKU)

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Target SPM | Target IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Tahun 2022 | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Proyeksi (rkpd) | | Catatan analisis |
|-----|---|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | - | - | 14,99 | 15,87 | 16,60 | 17,14 | 17,63 | n/a | n/a | 16,60 | 17,14 | |
| 2. | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | - | - | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | n/a | n/a | WTP | WTP | |

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan target Renstra Perangkat Daerah untuk 2 indikator kinerja selalu naik untuk 5 Tahun kedepan begitu pula proyeksi untuk Tahun 2020 sampai 2021 selalu meningkat.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ketiga sumber pendapatan daerah tersebut yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan adalah pendapatan asli daerah karena dua sumber penerimaan lainnya sangat tergantung dari penetapan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah. Sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Dalam rangka melakukan optimalisasi sumber pendapatan daerah terutama yang berasal penerimaan asli daerah, tanpa disadari akan melupakan substansi dari nilai-nilai pelayanan. Hal ini sering terjadi dimana suatu Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disisi lain efek pelayanan tersebut memberi dampak kepada penerimaan daerah sehingga SKPD menghadapi dualisme fungsi yang saling kontraproduktif. Kondisi ini pada akhirnya akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan dan asset daerah harus dilakukan secara tertib, efisien dan efektif. Ketepatan dalam pelayanan administrasi keuangan daerah, transparansi dalam kebijakan keuangan sangat dibutuhkan. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2018-2022 diharapkan mampu memberikan arah dan fokus strategi yang jelas dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah, pengaturan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung diupayakan untuk efisien dan efektif serta proposional. Hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Badan Keuangan Daerah untuk mewujudkan harapan diatas masih menemui berbagai isu permasalahan. Beberapa isu strategis yang sangat berkaitan dengan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai lembaga perencana pembangunan daerah adalah:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak.
2. Potensi pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.
3. Obyek pajak tidak disampaikan secara jujur dengan kondisi sebenarnya.
4. Penyampaian RKA dan laporan keuangan OPD tidak tepat waktu.
5. Regulasi keuangan yang selalu berubah.

6. Keterlambatan penyampaian SPJ oleh OPD.
7. Peningkatan kompetensi SDM
8. Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan asset
9. Peningkatan Kapasitas pengelolaan keuangan daerah
10. Peningkatan kualitas layanan pajak.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|------------|---|----------------|--------------------------|---|------------|--|----------------|-------------------------|---|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Singkawang | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | 100% | 2.934.380.000,00 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Singkawang | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | | 3.051.030.645 | Untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat perbedaan pagu dana antara Rancangan awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan |
| 2 | Penyediaan jasa surat menyurat | Singkawang | cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan | 100% | 4.590.000,00 | Penyediaan jasa surat menyurat | Singkawang | Cakupan Jasa Surat Menyurat yang di sediakan | 100% | 4.725.000,00 | |
| 3 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Singkawang | cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disedikan | 100% | 503.930.000,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Singkawang | Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia | 100% | 526.491.997,50 | |
| 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan | Singkawang | cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan | 100% | 214.200.000,00 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan | Singkawang | cakupan jasa pemeliharaan dan | 100% | 220.500.000,00 | |

| | dinas/operasional | | kendaraan dinas/operasional yang disediakan | | | dinas/operasional | | perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan | | | pada seluruh Kegiatan yang ada |
|----|--|------------|---|------|------------------|--|------------|---|------|------------------|--------------------------------|
| 5 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Singkawang | cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan | 100% | 224.400.000,00 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Singkawang | cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan | 100% | 231.000.000,00 | |
| 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Singkawang | cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 100% | 13.110.000,00 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Singkawang | cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | 100% | 13.496.962,50 | |
| 7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Singkawang | cakupan jasa Alat Tulis Kantor yang disediakan | 100% | 111.330.000,00 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Singkawang | cakupan jasa Alat Tulis Kantor yang disediakan | 100% | 114.606.502,50 | |
| 8 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Singkawang | cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 100% | 60.080.000,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Singkawang | cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 100% | 61.847.966,25 | |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Singkawang | cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 100% | 224.400.000,00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Singkawang | cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 100% | 231.000.000,00 | |
| 10 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Singkawang | cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 100% | 6.380.000,00 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Singkawang | cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 100% | 6.562.500,00 | |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Singkawang | cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan | 100% | 74.970.000,00 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Singkawang | cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan | 100% | 77.175.000,00 | |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Singkawang | cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan | 100% | 1.084.400.000,00 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Singkawang | cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan | 100% | 1.135.210.771,80 | |
| 13 | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran | Singkawang | cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang | 100% | 361.590.000,00 | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran | Singkawang | cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang | 100% | 375.913.944,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|---|---------|-------------------------|--|------------|---|---------|----------------------|--|
| | | | disediakan | | | | | disediakan | | | |
| 14 | Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah | Singkawang | cakupan Tamu daerah yang disediakan fasilitasnya | 100% | 51.000.000,00 | Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah | Singkawang | cakupan Tamu daerah yang disediakan fasilitasnya | 100% | 52.500.000,00 | |
| 15 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Singkawang | Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur | 100% | 4.371.920.000,00 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Singkawang | Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur | 100% | 4.567.370.850 | Untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana |
| 16 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Singkawang | cakupan kendaraan dinas/operasional yang diadakan | 100% | 722.600.000,00 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Singkawang | cakupan kendaraan dinas/operasional yang diadakan | 100% | 754.950.000,00 | Aparatur terdapat perbedaan pagu |
| 17 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Singkawang | cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 100% | 708.270.000,00 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Singkawang | cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 100% | 739.987.500,00 | dana antara Rancangan awal RKPD dan Hasil |
| 18 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Singkawang | cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan | 100% | 618.080.000,00 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Singkawang | cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan | 100% | 645.750.000,00 | Analisis Kebutuhan pada seluruh |
| 19 | Pengadaan Tanah | Singkawang | cakupan Pengadaan Tanah yang diadakan | 100% | 1.660.940.000,00 | Pengadaan Tanah | Singkawang | cakupan Pengadaan Tanah yang diadakan | 100% | 1.740.508.350,00 | Kegiatan yang ada |
| 20 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Singkawang | cakupan Gedung Kantor yang dipelihara | 100% | 353.500.000,00 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Singkawang | cakupan Gedung Kantor yang dipelihara | 100% | 367.500.000,00 | |
| 21 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Singkawang | cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 100% | 211.630.000,00 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Singkawang | cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 100% | 218.925.000,00 | |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Singkawang | cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 100% | 96.900.000,00 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Singkawang | cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 100% | 99.750.000,00 | |
| 23 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Singkawang | Persentase aparatur yang disiplin | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Singkawang | Persentase Peningkatan disiplin aparatur | 100% | 57.750.000 | Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur |
| 24 | Pengadaan pakaian dinas beserta | Singkawang | Jumlah pakaian dinas yang | 65 Stel | | Pengadaan pakaian dinas beserta | Singkawang | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | 65 stel | 57.750.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-------------|-----------------------|---|------------|--|-------------|--------------------|--|
| | perlengkapannya | | diadakan | | | perlengkapannya | | | | | berjumlah dua |
| 25 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Singkawang | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan | 65 Stel | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Singkawang | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan | | | program, dimana keduanya dalam rancangan awal RKPD tidak memiliki Pagu indikatif |
| 26 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Singkawang | Persentase penyusunan PAK tenaga fungsional meningkat | 100% | 153.000.000,00 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Singkawang | Persentase penyusunan PAK tenaga fungsional meningkat | 100% | 157.500.000 | Untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat perbedaan pagu dana antara Rancangan awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan pada seluruh Kegiatan yang ada |
| 27 | Pendidikan dan pelatihan formal | Singkawang | cakupan Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100% | 51.000.000,00 | Pendidikan dan pelatihan formal | Singkawang | cakupan Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100% | 52.500.000,00 | |
| 28 | Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur | Singkawang | cakupan peserta yang mengikuti bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur | 100% | 102.000.000,00 | Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur | Singkawang | cakupan peserta yang mengikuti bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur | 100% | 105.000.000,00 | |
| 29 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Singkawang | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 42.640.000,00 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Singkawang | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 59.421.023 | Untuk program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat |
| 30 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Singkawang | Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 dokumen | 5.000.000,00 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Singkawang | Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 1 dokumen | 8.400.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|--|-------------|----------------------|--|------------|--|-------------|-------------------|--|
| 31 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Singkawang | Dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1 dokumen | 5.000.000,00 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Singkawang | Dokumen laporan keuangan akhir tahun | 1 dokumen | 8.391.022,50 | perbedaan pagu dana antara Rancangan awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan pada seluruh Kegiatan yang ada |
| 32 | Penyusunan LAKIP SKPD | Singkawang | Dokumen LAKIP SKPD | 1 dokumen | 8.160.000,00 | Penyusunan LAKIP SKPD | Singkawang | Dokumen LAKIP SKPD | 1 dokumen | 8.400.000,00 | |
| 33 | Penyusunan Renstra SKPD | Singkawang | Jumlah Renstra SKPD | 1 dokumen | - | Penyusunan Renstra SKPD | Singkawang | Jumlah Renstra SKPD | 0 dokumen | | |
| 34 | Penyusunan LPPD / LKPJ | Singkawang | Dokumen LPPD / LKPJ | 1 dokumen | 8.160.000,00 | Penyusunan LPPD / LKPJ | Singkawang | Dokumen LPPD / LKPJ | 1 dokumen | 8.400.000,00 | |
| 35 | Penyusunan Profil SKPD | Singkawang | Dokumen Profil SKPD | 1 dokumen | 8.160.000,00 | Penyusunan Profil SKPD | Singkawang | Dokumen Profil SKPD | 1 dokumen | 8.400.000,00 | |
| 36 | Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) | Singkawang | Dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) | 2 dokumen | 8.160.000,00 | Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) | Singkawang | Dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) | 2 dokumen | 8.400.000,00 | |
| 37 | Penyusunan Renja SKPD | Singkawang | Jumlah Renja SKPD | 1 dokumen | | Penyusunan Renja SKPD | Singkawang | Jumlah Renja SKPD | 1 dokumen | 9.030.000,00 | |
| 38 | Program Penguatan Transparansi Publik | Singkawang | Persentase transparansi publik | 100% | 20.100.000,00 | Program Penguatan Transparansi Publik | Singkawang | Persentase transparansi publik | 100% | 21.000.000 | Untuk program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat perbedaan pagu dana antara Rancangan awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan pada seluruh Kegiatan yang ada |
| 39 | Expo Kinerja SKPD | Singkawang | Jumlah Kegiatan Expo | 1 kegiatan | 20.100.000,00 | Expo Kinerja SKPD | Singkawang | Jumlah Kegiatan Expo | 1 kegiatan | 21.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----------|-------------------------|---|------------|---|-----------|----------------|--|
| 40 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun | | 3.468.290.000,00 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Singkawang | Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun | 7 Dokumen | 3.464.171.131 | Untuk program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perbedaan pagu dana antara Rancangan awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan pada seluruh Kegiatan yang ada |
| | | | Persentase Silpa terhadap APBD | | | | | Persentase Silpa terhadap APBD | 0% | | |
| | | | Persentase aset-aset daerah yang terdata | | | | | Persentase aset-aset daerah yang terdata | 100% | | |
| 41 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Singkawang | Jumlah peraturan daerah tentang APBD Kota Singkawang | 1 perda | 133.000.000,00 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Singkawang | Jumlah peraturan daerah tentang APBD Kota Singkawang | 1 perda | 136.907.400,00 | |
| 42 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Singkawang | Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD | 1 perwako | 81.770.000,00 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Singkawang | Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD | 1 perwako | 84.178.710,00 | |
| 43 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Singkawang | Jumlah Perda tentang Perubahan APBD | 1 perda | 51.160.000,00 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Singkawang | Jumlah Perda tentang Perubahan APBD | 1 perda | 52.667.475,00 | |
| 44 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Singkawang | Jumlah Perda tentang Perubahan Penjabaran APBD | 1 perwako | 35.660.000,00 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Singkawang | Jumlah Perda tentang Perubahan Penjabaran APBD | 1 perwako | 36.712.725,00 | |
| 45 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Singkawang | Jumlah Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD | 1 perda | 93.800.000,00 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Singkawang | Jumlah Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD | 1 perda | 96.556.241,25 | |
| 46 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran | Singkawang | Jumlah Perwako tentang Pertanggung Jawaban | 1 perwako | 34.890.000,00 | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran | Singkawang | Jumlah Perwako tentang Pertanggung Jawaban | 1 perwako | 35.911.050,00 | |

| | pertanggungjawab an pelaksanaan APBD | | Pelaksanaan APBD | | | pertanggungjawab an pelaksanaan APBD | | Pelaksanaan APBD | | | |
|----|---|------------|---|----------------|----------------|---|------------|---|------------------|--------------------|--|
| 47 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Singkawang | cakupan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan | 12 bulan | 588.220.000,00 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Singkawang | Cakupan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan | 100% | 605.517.150,0 0 | |
| 48 | Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtangana n Barang Milik Daerah | 5 dokumen | 101.980.000,00 | Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | 5 dokume n | 104.980.050,0 0 | |
| 49 | Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan | Singkawang | cakupan Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan | 1 dokumen | 20.280.000,00 | Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan | Singkawang | Jumlah dokumen Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan | 100% | 20.877.150,00 | |
| 50 | Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD | Singkawang | cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan | 5.321 SP2D | 77.130.000,00 | Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD | Singkawang | Cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan | 100% | 79.401.787,50 | |
| 51 | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer | Singkawang | Jumlah Dokumen/laporan Realisasi Dana Transfer | 4 laporan | 18.730.000,00 | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer | Singkawang | Jumlah Dokumen/laporan Realisasi Dana Transfer | 4 laporan | 19.278.735,00 | |
| 52 | Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang | Singkawang | Jumlah bulan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS | 14 bulan | 61.610.000,00 | Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang | Singkawang | Jumlah bulan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS | 14 bulan | 63.425.302,50 | |
| 53 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah dokumentasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa RKBMD, RKPBM D, Laporan Semester dan Tahunan Barang | 2 dokumen | 27.140.000,00 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah dokumentasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa RKBMD, RKPBM D, Laporan Semester dan Tahunan Barang | 2 dokumen | 27.933.465,00 | |
| 54 | Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang | Singkawang | Jumlah Perangkat Sistem Pengelolaan | 1 perangkat | 215.650.000,00 | Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang | Singkawang | Jumlah Perangkat Sistem Pengelolaan | 1 perangk | 221.996.460,0 0 | |

| | Milik Daerah | | Barang Milik Daerah | | | Milik Daerah | | Barang Milik Daerah | at | | |
|----|--|------------|---|------------|----------------|--|------------|---|------------|----------------|--|
| 55 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah | 1 dokumen | 16.520.000,00 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah | 1 dokumen | 17.006.167,50 | |
| 56 | Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 orang | 45.080.000,00 | Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 orang | 46.409.895,00 | |
| 57 | Serah Terima Aset | Singkawang | Jumlah dokumen Penyelesaian Serah Terima Aset | 1 dokumen | 28.230.000,00 | Serah Terima Aset | Singkawang | Jumlah dokumen Penyelesaian Serah Terima Aset | 1 dokumen | 29.065.260,00 | |
| 58 | Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) | Singkawang | Jumlah Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) | 1 aplikasi | 584.950.000,00 | Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) | Singkawang | Jumlah Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) | 1 aplikasi | 602.152.268,55 | |
| 59 | Workshop Pemantapan Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan SIPKD | Singkawang | Jumlah OPD peserta workshop | 26 opd | 132.910.000,00 | Workshop Pemantapan Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan SIPKD | Singkawang | Jumlah OPD peserta workshop | 26 opd | 136.818.648,75 | |
| 60 | Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya | Singkawang | Jumlah paket Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya | 1 paket | 27.310.000,00 | Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya | Singkawang | Jumlah paket Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya | 1 paket | 28.111.912,50 | |
| 61 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota | Singkawang | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan | 18 laporan | 224.620.000,00 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota | Singkawang | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan | 18 laporan | 231.229.320,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|------------------|---------------|---|------------|---|------------------|---------------|--|
| | Singkawang | | | | | Singkawang | | | | | |
| 62 | Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD | Singkawang | Persentase penyelesaian Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD | 100 % | 27.000.000,00 | Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD | Singkawang | Persentase penyelesaian Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD | 100% | 27.789.300,00 | |
| 63 | Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana | Singkawang | Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana | 1 dokumen | 20.230.000,00 | Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana | Singkawang | Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana | 1 dokumen | 20.825.700,00 | |
| 64 | Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga | Singkawang | Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga | 12 laporan | 11.180.000,00 | Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga | Singkawang | Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga | 12 bulan/laporan | 11.512.567,50 | |
| 65 | Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD | Singkawang | Tersedianya Bahan Penyusunan Raperda | 6 dokumen | 8.160.000,00 | Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD | Singkawang | Tersedianya Bahan Penyusunan Raperda | 6 dokumen | 8.399.790,00 | |
| 66 | Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) | Singkawang | Jumlah Laporan Realisasi SPM SKPD dan PPKD | 12 bulan/laporan | 19.970.000,00 | Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) | Singkawang | Jumlah Laporan Realisasi SPM SKPD dan PPKD | 12 bulan/laporan | 20.556.165,00 | |
| 67 | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD | Singkawang | Jumlah laporan realisasi Anggaran PPKD | 6 dokumen | 8.160.000,00 | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD | Singkawang | Jumlah laporan realisasi Anggaran PPKD | 6 dokumen | 8.399.842,50 | |
| 68 | Distribusi Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah Distribusi Barang Milik Daerah ke OPD | 21 opd | 17.220.000,00 | Distribusi Barang Milik Daerah | Singkawang | | 21 opd | 17.729.775,00 | |
| 69 | Penilaian Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen Kodefikasi BMD | 1 dokumen | 27.730.000,00 | Penilaian Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen Kodefikasi BMD | 1 dokumen | 28.549.290,00 | |
| 70 | Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah | 1 dokumen | 13.420.000,00 | Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah | 1 dokumen | 13.818.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----------|-------------------------|---|------------|---|-----------|----------------|--|
| 71 | Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah | Singkawang | Jumlah Peserta Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran | 160 orang | 103.130.000,00 | Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah | Singkawang | Jumlah Peserta Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran | 160 orang | 106.159.725,00 | |
| 72 | Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD TA. 2019 | Singkawang | Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri | 26 OPD | 86.700.000,00 | Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD TA. 2019 | Singkawang | Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri | 26 OPD | 89.250.000,00 | |
| 73 | Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah peserta sosialisasi Permendagri | 120 orang | 100.660.000,00 | Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | Singkawang | Jumlah peserta sosialisasi Permendagri | 120 orang | 103.617.517,50 | |
| 74 | Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan | Singkawang | Jumlah dokumen aset tanah dan bangunan | 1 dokumen | 45.590.000,00 | Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan | Singkawang | Jumlah dokumen aset tanah dan bangunan | 1 dokumen | 46.926.285,00 | |
| 75 | Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen laporan neraca aset daerah | | 178.500.000,00 | Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen laporan neraca aset daerah | 1 dokumen | 183.750.000,00 | |
| 76 | Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD | Singkawang | Jumlah OPD peserta sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah | | - | Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD | Singkawang | Jumlah OPD peserta sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah | 26 OPD | 99.750.000,00 | |
| 77 | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Singkawang | Persentase kenaikan pendapatan asli daerah | | 2.958.790.000,00 | Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Singkawang | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 11,64% | 3.261.667.144 | Untuk program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| 78 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB | Singkawang | Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB | 1 dokumen | 205.960.000,00 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB | Singkawang | Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB | 1 dokumen | 212.018.467,50 | terdapat perbedaan pagu |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|--------------|----------------|---|------------|--|--------------|----------------|---|
| 79 | Penertiban Izin Pemasangan Reklame | Singkawang | Jumlah Penertiban Izin Pemasangan Reklame | 1 dokumen | 123.690.000,00 | Penertiban Izin Pemasangan Reklame | Singkawang | Jumlah Penertiban Izin Pemasangan Reklame | 1 dokumen | 127.323.210,00 | dana antara Rancangan awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan pada seluruh Kegiatan yang ada |
| 80 | Rapat Koordiansi Pendaptan Asli Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordiansi Pendaptan Asli Daerah | 2 dokumen | 39.750.000,00 | Rapat Koordiansi Pendaptan Asli Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordiansi Pendaptan Asli Daerah | 2 dokumen | 40.915.035,00 | |
| 81 | Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan | Singkawang | Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 | 1 dokumen | 179.360.000,00 | Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan | Singkawang | Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 | 1 dokumen | 184.635.150,00 | |
| 82 | Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | Singkawang | Jumlah Dokumen Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | 1 dokumen | 171.260.000,00 | Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | Singkawang | Jumlah Dokumen Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | 1 dokumen | 176.298.990,00 | |
| 83 | Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah | Singkawang | Jumlah Dokumen Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah | 4 dokumen | 341.020.000,00 | Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah | Singkawang | Jumlah Dokumen Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah | 4 dokumen | 353.824.380,00 | |
| 84 | Penertiban Penerimaan Pajak Daerah | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Penertiban Penerimaan Pajak Daerah | 1 dokumen | 188.240.000,00 | Penertiban Penerimaan Pajak Daerah | Singkawang | Jumlah Dokumen Hasil Penertiban Penerimaan Pajak Daerah | 1 dokumen | 193.773.510,00 | |
| 85 | Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2 | Singkawang | Jumlah Perwako PBB-P2 | 1 perwako | 27.130.000,00 | Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2 | Singkawang | Jumlah Perwako PBB-P2 | 1 perwako | 27.925.091,25 | |
| 86 | Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2 | Singkawang | Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2 | 75.000 SPPT | 139.510.000,00 | Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2 | Singkawang | Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2 | 75.000 SPPT | 143.612.752,50 | |
| 87 | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | 1 dokumen | 178.670.000,00 | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | 1 dokumen | 183.925.350,00 | |
| 88 | Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib | Singkawang | Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah | 1 basis data | 673.690.000,00 | Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib | Singkawang | Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah | 1 basis data | 703.852.275,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|--------------------|-----------------------|---|------------|--|--------------------|-----------------------|--|--|
| | Pajak Daerah | | | | | Pajak Daerah | | | | | | |
| 89 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB | Singkawang | Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB | 2 dokumen | 150.580.000,00 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB & BPHTB | Singkawang | Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB | 2 dokumen | 155.012.025,00 | | |
| 90 | Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak | Singkawang | Jumlah produk hukum pajak daerah | 1 perda, 2 perwako | 14.710.000,00 | Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak | Singkawang | Jumlah produk hukum pajak daerah | 1 perda, 2 perwako | 15.140.160,00 | | |
| 91 | Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi | 2 dokumen | 321.100.000,00 | Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Singkawang | Jumlah dokumen sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi | 2 dokumen | 333.154.710,00 | | |
| 92 | Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB | Singkawang | Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah | 2 dokumen | 204.120.000,00 | Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB | Singkawang | Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah | 2 dokumen | 210.122.587,50 | | |
| 93 | Pemuktahiran Data Piutang PBB-P2 | Singkawang | Jumlah dokumen Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 | - | - | Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 | Singkawang | Jumlah dokumen Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 | 1 dokumen | 200.133.450,00 | | |
| 94 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah | Singkawang | Persentase Peningkatan sistem Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | 381.770.000,00 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah | Singkawang | Persentase Peningkatan sistem Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | | 377.241.700,00 | | Untuk program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah terdapat perbedaan pagu dana antara Rancangan awal RKPD dan Hasil |
| 95 | Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2 | Singkawang | Jumlah Objek Pajak PBB-P2 yang dimutakhirkan | 30.000 op | 381.770.000,00 | Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2 | Singkawang | Jumlah Objek Pajak PBB-P2 yang dimutakhirkan | 30.000 op | 377.241.700,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | Analisis Kebutuhan pada seluruh Kegiatan yang ada |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**Tabel 2.4.****Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat**

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|-------------------------|--------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tidak Ada Usulan | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2022 bahwa Visi Pembangunan Kota Singkawang yang ditetapkan untuk tahun 2018-2022 adalah : **"Singkawang HEBAT 2022"** Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi Singkawang HEBAT 2022 mengandung makna strategis, sebagai berikut :

- a. **H**armonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- b. **E**konomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
- c. **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan;
- d. **A**dil dan Merata dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
- e. **T**erdepan dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5(lima) Misi Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;

2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Kota Singkawang tersebut, Badan Keuangan Kota Singkawang sebagai unsur staf mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKD Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah dan,.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Singkawang dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis PD (Renstra PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BKD Kota Singkawang serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi keempat: **"Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi"** dengan program prioritas Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan terhadap aparatur pelayanan publik;
2. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik;
3. Menata dan meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis TI;
4. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pelayanan publik;
5. Melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur daerah;
6. Pembinaan terhadap aparat pengelolaan keuangan daerah;
7. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan keuangan daerah;
8. Mengembangkan pengelolaan pendapatan asli daerah;
9. Menata kelembagaan pengelolaan keuangan;
10. Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci.

3.1.2 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022

Telaah terhadap RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, adalah sebagai berikut :

- 1) Pada RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pembangunan Kota Singkawang yang terdiri dari 15 tujuan, 25 sasaran dan 45 indikator kinerja sasaran yang terukur setiap tahunnya dalam kerangka pencapaian visi dan misi.
- 2) Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 pada RPJMD telah dirumuskan arah pembangunan Kota Singkawang dan rumusan program pembangunan sebanyak 93 program, disertai dengan pagu indikatif dan indikator capaian target pada setiap tahunnya yang tersebar di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Penjabaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari uraian tersebut diatas, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang memiliki tugas yang sangat strategis dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Singkawang. Peran strategis Badan Keuangan Daerah untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kota Singkawang terutama dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan harus mempedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.

3.1.3 TELAAHAN RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019 DAN TELAAHAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEDAPATAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE TAHUN 2017-2018

3.1.3.1 TELAAHAN RENSTRA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif, mendorong perlunya upaya pemantapan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Guna mewujudkan hal tersebut, DJKD menetapkan Renstra 2010-2014, sebagai berikut:

Tujuan :

"Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif"

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Arah Kebijakan :

Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;

1. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis dibidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD,

dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;

2. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Strategi :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

3.1.3.2 TELAAHAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE TAHUN 2018-2023

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah beserta indikatornya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|----|----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata | Meningkatnya Kualitas Penyusunan, Pelaksanaan | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|------|------|------|------|------|
| | Kelola Keuangan Daerah | dan Pertanggungjawaban Dokumen Penganggaran Daerah | Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | |
| | | Tercapainya Target Pendapatan Daerah | Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Dalam rangka mendukung Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan tujuan meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka disusunlah sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dokumen penganggaran daerah dengan indikator sasaran Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat.
2. Tercapainya target pendapatan daerah.

3.1.3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.1.3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang, ke depan Kota Singkawang berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam.

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang adalah :

1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Sebagai penyelarasan tata cara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan daerah;
3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kota Singkawang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2012-2032, beberapa Kawasan Strategis di Kota Singkawang antara lain meliputi :

1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu;
 - a. Kawasan Pusat Kota di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah;
 - b. Kawasan Muara Sungai Sedau di Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - c. Kawasan Nyarumkop-Bagak Sahwa di Kecamatan Singkawang Timur.
2. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam/atau teknologi tinggi yaitu;
 - a. Kawasan peternakan dan pertanian terpadu di Kecamatan Singkawang Selatan; dan
 - b. Kawasan Bandara di Kecamatan Singkawang Selatan.
3. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial yaitu kawasan permukiman Bukit Batu di Kecamatan Singkawang Tengah dan Naram di Kecamatan Singkawang Utara.

Berdasarkan Telaah RTRW Kota Singkawang tahun 2018-2022 tersebut diatas dimaksudkan agar identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Keuangan Daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat tupoksi Badan Keuangan Daerah memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retribusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

3.1.3.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP

yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatnya resiko perubahan iklim, meningkatnya kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatnya intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis (gambut), menurunkan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatnya jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatnya resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir(***frameworkofthinking***) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengutamakan (***mainstreaming***) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLH SKe dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BKD memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut

untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD Kota Singkawang terdapat 40 program prioritas yang perlu dilakukan karena pelaksanaannya berdampak pada lingkungan, meliputi :

- 1 Program pembangunan jalan, jembatan dan jembatan
- 2 Program pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong
- 3 Program pembangunan turap/talud/bronjong
- 4 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- 5 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
- 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 7 Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- 8 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- 9 Program pengendalian banjir
- 10 Program pembangunan infrastruktur bangunan Pemerintah
- 11 Program peningkatan pelayanan publik bidang pekerjaan umum
- 12 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- 13 Program Pemanfaatan Tata Ruang (RTH)
- 14 Program revitalisasi penyediaan Air Bersih
- 15 Program Pengembangan Perumahan
- 16 Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
- 17 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
- 18 Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 19 Program pengelolaan areal pemakaman
- 20 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 21 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 22 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 23 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 24 Program peningkatan pengendalian polusi
- 25 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup
- 26 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 27 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 28 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- 29 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 30 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- 31 Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Transportasi Daerah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 32 Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan
- 33 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 34 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 35 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- 36 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
- 37 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- 38 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 39 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 40 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengumpulan pajak dan retribusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Demikian pula yang terkait dengan pengelolaan atau optimalisasi pemanfaatan aset daerah juga tidak banyak terpengaruh atau mempengaruhi KLHS. Dalam dokumen KLHS tidak ditemui program Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang memberikan dampak negatife terhadap lingkungan hidup.

5.1 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEUANGAN DAERAH

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang dalam RPJMD yaitu: ***"Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi"***.

B. Sasaran

Sasaran Adalah Hasil Yang Diharapkan Dari Suatu Tujuan Yang Diformulasikan Secara Terukur, Spesifik, Mudah Dicapai, Rasional Untuk Dapat Dilaksanakan Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Kedepan. Adapun Sasaran Organisasi Merupakan Bagian

Yang Integral Dalam Perencanaan Strategi Organisasi. Sasaran Tersebut Harus Berisi Pernyataan Apa Yang Ingin Dicapai Organisasi Dalam Kurun Waktu Tertentu. Adapun Sasaran Badan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Visi Dan Misi Dalam RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Adalah “***Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah***”. Tujuan Dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Dapat Dilihat Pada Tabel Dibawah Ini:

Tabel 3.2
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|--|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah | Persentase PAD terhadap pendapatan | 14,99 | 15,87 | 16,60 | 17,14 | 17,63 |
| | | | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang**

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

| KODE | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan | indikator kinerja program/kegiatan | Rencana Tahun 2019 | | | catatan penting | Perkiraan Maju Tahun 2020 | |
|----------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | lokasi | target capaian kinerja | kebutuhan dana/pagu indikatif | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | KEUANGAN | | | | | | | |
| 4.02.4.02.02.001 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik | | 100% | 3.051.030.644,55 | | | 3.203.582.176,78 |
| 4.02.4.02.02.001.001 | Penyediaan jasa surat menyurat | cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 4.725.000,00 | - | 12 bulan | 4.961.250,00 |
| 4.02.4.02.02.001.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 526.491.997,50 | - | 12 bulan | 552.816.597,38 |
| 4.02.4.02.02.001.006 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 220.500.000,00 | - | | 231.525.000,00 |
| 4.02.4.02.02.001.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 231.000.000,00 | - | 12 bulan | 242.550.000,00 |
| 4.02.4.02.02.001.008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 13.496.962,50 | - | 12 bulan | 14.171.810,63 |

Renja 2019

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---------------------|------|-------------------------|---|----------|-------------------------|
| 4.02.4.02.02.001.010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | cakupan jasa Alat Tulis Kantor yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 114.606.502,50 | - | 12 bulan | 120.336.827,63 |
| 4.02.4.02.02.001.011 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | cakupan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 61.847.966,25 | - | 12 bulan | 64.940.364,56 |
| 4.02.4.02.02.001.012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 231.000.000,00 | - | 12 bulan | 242.550.000,00 |
| 4.02.4.02.02.001.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 6.562.500,00 | - | 12 bulan | 6.890.625,00 |
| 4.02.4.02.02.001.017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 77.175.000,00 | - | 12 bulan | 81.033.750,00 |
| 4.02.4.02.02.001.018 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 1.135.210.771,80 | - | 12 bulan | 1.191.971.310,39 |
| 4.02.4.02.02.001.020 | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran | cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 375.913.944,00 | - | 12 bulan | 394.709.641,20 |
| 4.02.4.02.02.001.025 | Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah | cakupan Tamu daerah yang disediakan fasilitasnya | BKD Kota Singkawang | 100% | 52.500.000,00 | - | 12 bulan | 55.125.000,00 |
| 4.02.4.02.02.002 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Peningkatan sarana prasarana aparatur | BKD Kota Singkawang | 100% | 4.567.370.850,00 | | | 4.795.739.392,50 |
| 4.02.4.02.02.002.005 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | cakupan kendaraan dinas/operasional yang diadakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 754.950.000,00 | - | 6 unit | 792.697.500,00 |
| 4.02.4.02.02.002.007 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | cakupan perlengkapan gedung kantor yang diadakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 739.987.500,00 | - | 8 paket | 776.986.875,00 |
| 4.02.4.02.02.002.009 | Pengadaan peralatan gedung kantor | cakupan peralatan gedung kantor yang diadakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 645.750.000,00 | - | 9 paket | 678.037.500,00 |
| 4.02.4.02.02.002.011 | Pengadaan Tanah | cakupan Pengadaan Tanah yang diadakan | BKD Kota Singkawang | 100% | 1.740.508.350,00 | - | 1 paket | 1.827.533.767,50 |
| 4.02.4.02.02.002.022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | cakupan Gedung Kantor yang dipelihara | BKD Kota Singkawang | 100% | 367.500.000,00 | - | 12 bulan | 385.875.000,00 |
| 4.02.4.02.02.002.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | BKD Kota Singkawang | 100% | 218.925.000,00 | - | 12 bulan | 229.871.250,00 |

Renja 2019

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|---------------------|-----------|-----------------------|---|------------|-----------------------|
| 4.02.4.02.02.002.025 | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | cakupan peralatan gedung kantor yang dipelihara | BKD Kota Singkawang | 100% | 99.750.000,00 | - | 12 bulan | 104.737.500,00 |
| 4.02.4.02.02.003 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase peningkatan disiplin Aparatur | BKD Kota Singkawang | | 57.750.000,00 | | | 84.341.250,00 |
| 4.02.4.02.02.003.002 | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | BKD Kota Singkawang | 65 stel | 57.750.000,00 | - | | - |
| 4.02.4.02.02.003.005 | | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan | BKD Kota Singkawang | | - | - | 65 pegawai | 84.341.250,00 |
| 4.02.4.02.02.005 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase penyusunan PAK tenaga fungsional meningkat | BKD Kota Singkawang | 100% | 157.500.000,00 | | | 165.375.000,00 |
| 4.02.4.02.02.005.001 | | Pendidikan dan pelatihan formal | cakupan Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | BKD Kota Singkawang | 100% | 52.500.000,00 | - | 10 orang | 55.125.000,00 |
| 4.02.4.02.02.005.010 | | Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur | cakupan peserta yang mengikuti bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur | BKD Kota Singkawang | 100% | 105.000.000,00 | - | 10 orang | 110.250.000,00 |
| 4.02.4.02.02.006 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | BKD Kota Singkawang | | 59.421.022,50 | | | 62.392.073,63 |
| 4.02.4.02.02.006.001 | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 8.400.000,00 | - | 1 dokumen | 8.820.000,00 |
| 4.02.4.02.02.006.004 | | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Dokumen laporan keuangan akhir tahun | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 8.391.022,50 | - | 1 dokumen | 8.810.573,63 |
| 4.02.4.02.02.006.005 | | Penyusunan LAKIP SKPD | Dokumen LAKIP SKPD | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 8.400.000,00 | - | 1 dokumen | 8.820.000,00 |
| 4.02.4.02.02.006.006 | | Penyusunan Renstra SKPD | Jumlah Renstra SKPD | BKD Kota Singkawang | 0 dokumen | - | - | 1 dokumen | 9.481.500,00 |
| 4.02.4.02.02.006.007 | | Penyusunan LPPD / LKPJ | Dokumen LPPD / LKPJ | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 8.400.000,00 | - | 1 dokumen | 8.820.000,00 |
| 4.02.4.02.02.006.008 | | Penyusunan Profil SKPD | Dokumen Profil SKPD | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 8.400.000,00 | - | 1 dokumen | 8.820.000,00 |
| 4.02.4.02.02.006.010 | | Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) | Dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) | BKD Kota Singkawang | 2 dokumen | 8.400.000,00 | - | 2 dokumen | 8.820.000,00 |
| 4.02.4.02.02.006.012 | | Penyusunan Renja SKPD | Jumlah Renja SKPD | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 9.030.000,00 | - | 1 dokumen | 9.481.500,00 |

Renja 2019

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|---|---------------------|------------|----------------|---|------------|-------------------------|
| 4.02.4.02.02.007 | | Program Penguatan Transparansi Publik | Persentase transparansi publik | BKD Kota Singkawang | | 21.000.000,00 | | | 22.050.000,00 |
| 4.02.4.02.02.007.001 | | Expo Kinerja SKPD | Jumlah Kegiatan Expo | BKD Kota Singkawang | 1 kegiatan | 21.000.000,00 | - | 1 kegiatan | 22.050.000,00 |
| 4.02.4.02.02.017 | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun | BKD Kota Singkawang | 7 Dokumen | 3.464.171.131 | - | 8 Dokumen | 3.637.379.687,60 |
| | | | Persentase Silpa terhadap APBD | | 0% | | - | 0% | |
| | | | Persentase aset-aset daerah yang terdata | | 100% | | - | 100% | |
| 4.02.4.02.02.017.006 | | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Jumlah peraturan daerah tentang APBD Kota Singkawang | BKD Kota Singkawang | 1 perda | 136.907.400,00 | - | 1 perda | 143.752.770,00 |
| 4.02.4.02.02.007.007 | | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD | Jumlah Perwako tentang Penjabaran APBD | BKD Kota Singkawang | 1 perwako | 84.178.710,00 | - | 2 perwako | 88.387.645,50 |
| 4.02.4.02.02.007.008 | | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Jumlah Perda tentang Perubahan APBD | BKD Kota Singkawang | 1 perda | 52.667.475,00 | - | 1 perda | 55.300.848,75 |
| 4.02.4.02.02.007.009 | | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Perda tentang Perubahan Penjabaran APBD | BKD Kota Singkawang | 1 perwako | 36.712.725,00 | - | 1 perwako | 38.548.361,25 |
| 4.02.4.02.02.007.010 | | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jumlah Perda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD | BKD Kota Singkawang | 1 perda | 96.556.241,25 | - | 1 perda | 101.384.053,31 |
| 4.02.4.02.02.007.011 | | Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Jumlah Perwako tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD | BKD Kota Singkawang | 1 perwako | 35.911.050,00 | - | 1 perwako | 37.706.602,50 |
| 4.02.4.02.02.007.020 | | Pengamanan Barang Milik Daerah | cakupan Pengamanan Barang Milik Daerah yang dilakukan | BKD Kota Singkawang | 100% | 605.517.150,00 | - | 100% | 635.793.007,50 |
| 4.02.4.02.02.007.021 | | Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | BKD Kota Singkawang | 5 dokumen | 104.980.050,00 | - | 5 dokumen | 110.229.052,50 |
| 4.02.4.02.02.007.022 | | Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan | cakupan Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 20.877.150,00 | - | 1 dokumen | 21.921.007,50 |

Renja 2019

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---------------------|-------------|----------------|---|-------------|----------------|
| 4.02.4.02.02.007.023 | Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD | cakupan SP2D belanja langsung yang diterbitkan | BKD Kota Singkawang | 5.321 SP2D | 79.401.787,50 | - | 5.321 SP2D | 83.371.876,88 |
| 4.02.4.02.02.007.024 | Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer | Jumlah Dokumen/laporan Realisasi Dana Transfer | BKD Kota Singkawang | 4 laporan | 19.278.735,00 | - | 4 laporan | 20.242.671,75 |
| 4.02.4.02.02.007.025 | Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang | Jumlah bulan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS | BKD Kota Singkawang | 14 bulan | 63.425.302,50 | - | 14 bulan | 66.596.567,63 |
| 4.02.4.02.02.007.026 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumentasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa RKBMD, RKPBM, Laporan Semester dan Tahunan Barang | BKD Kota Singkawang | 2 dokumen | 27.933.465,00 | - | 2 dokumen | 29.330.138,25 |
| 4.02.4.02.02.007.027 | Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Perangkat Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah | BKD Kota Singkawang | 1 perangkat | 221.996.460,00 | - | 1 perangkat | 233.096.283,00 |
| 4.02.4.02.02.007.028 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 17.006.167,50 | - | 1 Dokumen | 17.856.475,88 |
| 4.02.4.02.02.007.029 | Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Peserta Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | BKD Kota Singkawang | 100 orang | 46.409.895,00 | - | 160 orang | 48.730.389,75 |
| 4.02.4.02.02.007.030 | Serah Terima Aset | Jumlah dokumen Penyelesaian Serah Terima Aset | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 29.065.260,00 | - | 1 dokumen | 30.518.523,00 |
| 4.02.4.02.02.007.032 | Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) | Jumlah Implementasi dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) | BKD Kota Singkawang | 1 aplikasi | 602.152.268,55 | - | 1 aplikasi | 632.259.881,98 |
| 4.02.4.02.02.007.033 | FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah | Jumlah OPD peserta workshop | BKD Kota Singkawang | 26 opd | 136.818.648,75 | - | 26 opd | 143.659.581,19 |
| 4.02.4.02.02.007.034 | Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya | Jumlah paket Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya | BKD Kota Singkawang | 1 paket | 28.111.912,50 | - | 1 paket | 29.517.508,13 |
| 4.02.4.02.02.007.037 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang | Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan | BKD Kota Singkawang | 18 laporan | 231.229.320,00 | - | 18 laporan | 242.790.786,00 |
| 4.02.4.02.02.007.038 | Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD | Persentase penyelesaian Dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD | BKD Kota Singkawang | 100% | 27.789.300,00 | - | 100% | 29.178.765,00 |
| 4.02.4.02.02.007.040 | Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana | Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 20.825.700,00 | - | 1 dokumen | 21.866.985,00 |

| | | Penyediaan Dana | | | | | | |
|----------------------|---|---|---------------------|------------------|----------------|---|------------------|----------------|
| 4.02.4.02.02.007.041 | Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga | Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga | BKD Kota Singkawang | 12 laporan | 11.512.567,50 | - | 12 laporan | 12.088.195,88 |
| 4.02.4.02.02.007.042 | Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD | Tersedianya Bahan Penyusunan Raperda | BKD Kota Singkawang | 6 dokumen | 8.399.790,00 | - | 6 dokumen | 8.819.779,50 |
| 4.02.4.02.02.007.043 | Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) | Jumlah Laporan Realisasi SPM SKPD dan PPKD | BKD Kota Singkawang | 12 bulan/Laporan | 20.556.165,00 | - | 12 bulan/Laporan | 21.583.973,25 |
| 4.02.4.02.02.007.044 | Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD | Jumlah laporan realisasi Anggaran PPKD | BKD Kota Singkawang | 6 dokumen | 8.399.842,50 | - | 6 dokumen | 8.819.834,63 |
| 4.02.4.02.02.007.047 | Distribusi Barang Milik Daerah | Jumlah Distribusi Barang Milik Daerah ke OPD | BKD Kota Singkawang | 21 OPD | 17.729.775,00 | - | 21 OPD | 18.616.263,75 |
| 4.02.4.02.02.007.050 | Penilaian Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Kodefikasi BMD | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 28.549.290,00 | - | 1 dokumen | 29.976.754,50 |
| 4.02.4.02.02.007.051 | Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 13.818.000,00 | - | 1 dokumen | 14.508.900,00 |
| 4.02.4.02.02.007.052 | Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah | Jumlah Peserta Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran | BKD Kota Singkawang | 160 orang | 106.159.725,00 | - | 160 orang | 111.467.711,25 |
| 4.02.4.02.02.007.054 | Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD TA. 2019 | Jumlah OPD peserta sosialisasi Permendagri | BKD Kota Singkawang | 26 OPD | 89.250.000,00 | - | 26 OPD | 93.712.500,00 |
| 4.02.4.02.02.007.055 | Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah peserta sosialisasi Permendagri | BKD Kota Singkawang | 120 Orang | 103.617.517,50 | - | 120 Orang | 108.798.393,38 |
| 4.02.4.02.02.007.056 | Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan | Jumlah dokumen aset tanah dan bangunan | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 46.926.285,00 | - | 1 dokumen | 49.272.599,25 |
| 4.02.4.02.02.007.057 | Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah | Jumlah dokumen laporan neraca aset daerah | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 183.750.000,00 | - | 1 dokumen | 192.937.500,00 |
| 4.02.4.02.02.007.058 | Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD | Jumlah OPD peserta sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah | BKD Kota Singkawang | 26 OPD | 99.750.000,00 | - | 26 OPD | 104.737.500,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---------------------|--------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------|
| 4.02.4.02.02.040 | Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) | Prosentase kenaikan pendapatan asli daerah | BKD Kota Singkawang | | 3.261.677.143,75 | | | 3.424.750.500,94 |
| 4.02.4.02.02.040.001 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB | Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 212.018.467,50 | - | 1 dokumen | 222.619.390,88 |
| 4.02.4.02.02.040.002 | Penertiban Izin Pemasangan Reklame | Jumlah Penertiban Izin Pemasangan Reklame | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 127.323.210,00 | - | 1 dokumen | 133.689.370,50 |
| 4.02.4.02.02.040.003 | Rapat Koordiansi Pendaptan Asli Daerah | Jumlah dokumen Kegiatan Rapat Koordiansi Pendaptan Asli Daerah | BKD Kota Singkawang | 2 dokumen | 40.915.035,00 | - | 2 dokumen | 42.960.786,75 |
| 4.02.4.02.02.040.004 | Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan | Jumlah dokumen Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 184.635.150,00 | - | 1 dokumen | 193.866.907,50 |
| 4.02.4.02.02.040.005 | Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 176.298.990,00 | - | 1 dokumen | 185.113.939,50 |
| 4.02.4.02.02.040.006 | Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah | Jumlah Dokumen Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah | BKD Kota Singkawang | 4 dokumen | 353.824.380,00 | - | 4 dokumen | 371.515.599,00 |
| 4.02.4.02.02.040.007 | Penertiban Penerimaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penertiban Penerimaan Pajak Daerah | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 193.773.510,00 | - | 1 dokumen | 203.462.185,50 |
| 4.02.4.02.02.040.008 | Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2 | Jumlah Perwako PBB-P2 | BKD Kota Singkawang | 1 perwako | 27.925.091,25 | - | 1 perwako | 29.321.345,81 |
| 4.02.4.02.02.040.011 | Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2 | Jumlah pencetakan SPPT dan DHKP PBB-P2 | BKD Kota Singkawang | 75.000 SPPT | 143.612.752,50 | - | 75.000 SPPT | 150.793.390,13 |
| 4.02.4.02.02.040.012 | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | Jumlah dokumen pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 183.925.350,00 | - | 1 dokumen | 193.121.617,50 |
| 4.02.4.02.02.040.014 | Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen data dan aplikasi wajib pajak daerah | BKD Kota Singkawang | 1 basis data | 703.852.275,00 | - | 1 basis data | 739.044.888,75 |
| 4.02.4.02.02.040.015 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB | Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB | BKD Kota Singkawang | 2 dokumen | 155.012.025,00 | - | 2 dokumen | 162.762.626,25 |
| 4.02.4.02.02.040.018 | Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak | Jumlah produk hukum pajak daerah | BKD Kota Singkawang | 1 perda, 2 perwako | 15.140.160,00 | - | 1 perda, 2 perwako | 15.897.168,00 |
| 4.02.4.02.02.040.019 | Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi | BKD Kota Singkawang | 2 dokumen | 333.154.710,00 | - | 2 dokumen | 349.812.445,50 |

Renja 2019

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---------------------|-----------|-----------------------|---|-------------|-----------------------|
| 4.02.4.02.02.040.020 | Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB | Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah dan wajib pajak daerah | BKD Kota Singkawang | 2 dokumen | 210.122.587,50 | - | 2 dokumen | 220.628.716,88 |
| 4.02.4.02.02.040.021 | Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 | Jumlah dokumen Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 | BKD Kota Singkawang | 1 dokumen | 200.133.450,00 | - | 1 dokumen | 210.140.122,50 |
| 4.02.4.02.02.055 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah | Prosentase Peningkatan sistem Pengendalian dan Evauasi Pendapatan Daerah | BKD Kota Singkawang | 100% | 396.103.785,00 | | 100% | 415.908.974,25 |
| 4.02.4.02.02.055.001 | Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2 | Jumlah Objek Pajak PBB-P2 yang dimutakhirkan | BKD Kota Singkawang | 30.000 op | 396.103.785,00 | - | 30.000 op | 415.908.974,25 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program **Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. **3.051.030.644,55** dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 4.725.000,00
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 526.491.997,50
- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 220.500.000,00
- Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 231.000.000,00
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 13.496.962,50
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 114.606.502,50
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 61.847.966,25
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 231.000.000,00
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 6.562.500,00
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 77.175.000
- Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.135.210,771,80
- Kegiatan Penyediaan jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 375.913.944,00
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Tamu Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 52.500.000,00

2. Program **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. **4.567.370.850,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 754.950.000,00
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 739.987.500,00
- Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 645.750.000,00
- Kegiatan Pengadaan Tanah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.740.508.350,00
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 367.500.000,00
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 218.925.000,00
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 99.750.000,00

3. Program **Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. **57.750.000,00**, dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 57.750.000,00
- Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. -

4. Program **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. **157.500.000,00**, dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 52.500.000,00
- Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 105.000.000,00,

5. Program **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. **59.421.022,50**, dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.400.000,00
- Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.391.022,50
- Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.400.000,00
- Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 9.030.000,00
- Kegiatan Penyusunan LPPD / LKPJ
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.400.000,00
- Kegiatan Penyusunan Profil SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.400.000,00
- Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.400.000,00

6. Program Penguatan Transparansi Publik

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesarRp. **21.000.000,00**

dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Expo Kinerja SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. **21.000.000,00**

7. Program **Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesarRp. **3.464.171.131,05** dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 136.907.400,00
- Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 84.178.710,00
- Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 52.667.475,00
- Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

- Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 36.712.725,00
- Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 96.556.241,25
- Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 35.911.050,00
- Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 605.517.150,00
- Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 104.980.050,00
- Kegiatan Penataan Administrasi Pengelolaan Pertanahan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.877.150,00
- Kegiatan Penelitian dan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 79.401.787,50
- Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 19.278.735,00
- Kegiatan Pengelolaan Gaji PNS Kota Singkawang
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 63.425.302,50
- Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 27.933.465,00
- Kegiatan Fasilitasi Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 221.996.460,00
- Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 17.006.167,50
- Kegiatan Rakor dan Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 46.409.895,00
- Kegiatan Serah Terima Aset
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 29.065.260,00
- Kegiatan Fasilitasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 602.152.268,55
- Kegiatan FGD Penatausahaan dan Akuntansi SKPD-SKPKD berbasis akrual menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 136.818.648,75

- Kegiatan Penataan Peruntukan Barang Milik Daerah, Perolehan Aset Dari Sumber Lainnya
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 28.111.912,50
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 231.229.320,00
- Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 27.789.300,00
- Kegiatan Pengendalian Administrasi Penyediaan Dana
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.825.700,00
- Kegiatan Penyusunan Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 11.512.567,50
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran SKPD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.399.790,00
- Kegiatan Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 20.556.165,00
- Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan PPKD
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 8.399.842,50
- Kegiatan Distribusi Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 17.729.775,00
- Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 28.549.290,00
- Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 13.818.000,00
- Kegiatan Workshop Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 106.159.725,00
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait Pedoman dan Penyusunan APBD TA. 2019
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 89.250.000,00
- Kegiatan Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 103.617.517,50
- Kegiatan Inventarisasi Aset Tanah dan Bangunan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 46.926.285,00
- Kegiatan Penyusunan Laporan Neraca Aset Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 183.750.000,00

- Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam Mendukung Penyusunan LKPD

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 99.750.000,00

8. Program **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. **3.261.567.143,75**, dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 212.018.467,50
- Kegiatan Penertiban Izin Pemasangan Reklame
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 127.323.210,00
- Kegiatan Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 40.915.035,00
- Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 184.635.150,00
- Kegiatan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 176.298.990,00
- Kegiatan Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan dan Pendataan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak air Tanah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 353.824.380,00
- Kegiatan Penertiban Penerimaan Pajak Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 193.773.510,00
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Perwako PBB-P2
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 27.925.091,25
- Kegiatan Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB-P2
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 143.612.752,50
- Kegiatan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 183.925.350,00
- Kegiatan Sistem Monitoring Online Data Transaksi Wajib Pajak Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 703.852.275,00
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPHTB
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 155.012.025,00
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Revisi Perda dan Perwako Pajak
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 15.140.160,00
- Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 333.154.710,00

- Kegiatan Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 210.122.587,50

9. Program **Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah**

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. **396.103.785,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Kegiatan Pemeliharaan Basis Data dan Aplikasi SIM PBB P2
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 396.103.785,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Singkawang serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018. Renja merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.

Dengan adanya Renja, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya pelaksanaan Rencana Strategis instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Singkawang maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain. Kegiatan-kegiatan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tahun 2019 umumnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan selalu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Akhir kata semoga dokumen Renja ini akan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Singkawang, April 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG

Drs. H. MU\$LIMIN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19700508 199010 0 002

